

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI INDONESIA

Fani Febrinia Salindri

Program Studi Pendidikan Geografi, Pascasarjana, Universitas Siliwangi
fani.f.salindri@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of slum settlements in urban areas is motivated by high urbanization, limited residential land, and high land prices, causing the emergence of uncontrolled slums in urban areas. The City Without Slums Program (KOTAKU) is the government's effort to improve the quality of life of people in slum areas and make it a livable place to live. The purpose of this study is to describe the KOTAKU program and analyze the implementation of the KOTAKU program in Indonesia. This research uses descriptive qualitative research, with data collection techniques in the form of literature studies from related agency publications and previous research. The results of this study indicate that the KOTAKU Program with the 100-0-100 Movement which means 100 percent access to proper drinking water, 0 percent slum settlements and 100 percent access to proper sanitation is an effort to eradicate uninhabitable settlements; The KOTAKU program in several cities in Indonesia has not been implemented properly due to aspects such as community participation, policy makers, budget funds that have not fully supported its goals and objectives. It can be concluded that the implementation of the KOTAKU program in Indonesia still requires good evaluation and supervision from the person in charge of policies and support from the community so that the objectives of this program can be realized very well and be able to improve the quality of the Indonesian people.*

Keyword: : Implementation, KOTAKU Program, Slum Settlements

Abstrak: Fenomena permukiman kumuh di perkotaan dilatarbelakangi oleh tingginya urbanisasi, keterbatasan lahan permukiman, dan tingginya harga lahan sehingga menimbulkan munculnya permukiman kumuh yang tidak terkendali di perkotaan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di kawasan kumuh dan menjadikan tempat tinggal yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program KOTAKU dan menganalisis implementasi pelaksanaan program KOTAKU di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari publikasi instansi terkait dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Program KOTAKU dengan Gerakan 100-0-100 yang berarti 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak merupakan upaya pengentasan permukiman tidak layak huni; Program KOTAKU pada beberapa kota di Indonesia belum terimplementasi dengan baik oleh adanya aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, pemangku kebijakan, anggaran dana yang belum sepenuhnya memberikannya terhadap sasaran dan tujuannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU di Indonesia masih dibutuhkan evaluasi dan pengawasan yang baik dari penanggungjawab kebijakan dan dukungan dari masyarakat sehingga tujuan dari program ini dapat terrealisasi dengan sangat baik serta mampu meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Implementasi; Program KOTAKU; Permukiman kumuh

PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan di Indonesia salah satunya adalah dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata, di mana mayoritas penduduk Indonesia tersebar di pulau Jawa tercatat 56,1% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2020). Urbanisasi yang tinggi sehingga wilayah perkotaan di Indonesia semakin padat. Persebaran penduduk di Indonesia tertinggi berpusat pada wilayah perkotaan di propinsi Jawa Barat. Tingginya angka urbanisasi di perkotaan, mendorong peningkatan kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal. Keterbatasan ruang atau lahan untuk tempat tinggal yang baik dan layak untuk penduduk namun menjadi kebutuhan yang dasar dan mendesak. Permintaan akan lahan yang sangat tinggi di perkotaan menyebabkan pula harga lahan yang tinggi. Sehingga bagi

penduduk atau masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah memiliki kecenderungan untuk mencari lahan permukiman di pinggiran kota dengan lingkungan yang kurang memadai dan memunculkan fenomena permukiman kumuh dan padat di perkotaan.

Permukiman kumuh menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pelaksana dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 H ayat 1 bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai *stakeholder* berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, masyarakat dan pihak yang peduli dengan masalah permukiman kumuh ini dapat dituntaskan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut sehingga dengan harapan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di kawasan kumuh.

Terwujudnya perkotaan dengan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat yang berarti layak untuk dihuni juga aman dari segala bahaya. Salah satu bahaya atau ancaman yang sering menghantui masyarakat perkotaan terutama di kawasan permukiman yang padat adalah bencana kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang biasa terjadi di wilayah perkotaan terutama di wilayah permukiman padat penduduk dan tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah permukiman kumuh (Firda, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kajian mengenai (1) Bagaimana gambaran umum Program KOTAKU? dan (2) Bagaimana implementasi program KOTAKU?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mana data yang diperoleh tidak dapat dinumerisasi sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur yang mana hasil diperoleh dari referensi-referensi maupun data yang dikumpulkan dari penelitian yang sudah ada dan selanjutnya dianalisis untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis isi. Dalam proses analisisnya terdapat pemilihan, perbandingan, penggabungan dan pemilahan yang disesuaikan dengan relevansi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Tinjauan Umum Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang mana pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu dengan peningkatan permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan kehidupan yang berkelanjutan.

Sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan sasaran dari RPJMN tahun 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Di mana pelaku utama penanganan permukiman kumuh adalah pemerintah daerah dengan merevitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam mewujudkan permukiman layak huni.

Pengentasan permukiman kumuh ini terdiri dari aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial ekonomi untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan yang berada di kawasan kumuh. Program KOTAKU dengan Gerakan 100-0-100 yang berarti 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

Secara umum, tujuan dari Program KOTAKU ini yakni untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Dalam perwujudan tujuan tersebut, menurut Kementerian PUPR pada situs resminya dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut.

- a) Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan
- b) Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c) Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengartikan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sehingga berdasarkan bidang keciptakaryaannya membatasi kondisi sarana prasarana pada aspek-aspek berikut ini.

- a) Keteraturan bangunan
- b) Jalan lingkungan
- c) Drainase lingkungan
- d) Penyediaan air bersih/minum
- e) Pengelolaan sampah
- f) Pengelolaan air limbah
- g) Pengamanan kebakaran
- h) Ruang terbuka publik

Capaian kinerja program diukur berdasarkan indikator *outcome* sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
- 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
- 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh

Indikator-indikator tersebut, disesuaikan dengan sasaran dari RPJMN tahun 2015-2019 yakni pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Indikator ini pun dapat menjadi acuan Program KOTAKU telah terimplementasi dengan baik dan/atau belum terimplementasi.

Berdasarkan skema pelaksanaan Program KOTAKU terdapat 5 komponen yang menjadi prioritas sebagai berikut.

- Komponen 1, Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan
- Komponen 2, Integrasi Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat
- Komponen 3, Perbaikan Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan di Kawasan Kumuh
- Komponen 4, Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
- Komponen 5, Dukungan untuk kondisi darurat bencana

2) Implementasi Program KOTAKU

Penelitian ini dilakukan analisis isi dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai implementasi Program KOTAKU dengan lokasi dan karakteristiknya tertentu.

a. Implementasi Program KOTAKU di Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, implementasi Program KOTAKU sudah terlaksana pada aspek tertentu dalam bentuk pembuatan drainase lingkungan dan jalan, pengadaan pelatihan dan pengawasan yang sesuai dengan SOP pada Pedoman Umum KOTAKU. Namun, pada aspek lainnya seperti sosialisasi sudah terlaksana tetapi belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan Program KOTAKU. Pada aspek sumber daya manusia termasuk sudah mencukupi namun partisipasi masyarakat masih kurang pada kegiatan program. Keterbatasan sumber daya fasilitas seperti pembebasan lahan dan sumber daya anggaran yang masih kurang mencukupi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota, implementasi Program KOTAKU belum terimplementasi seluruhnya dengan sasaran dan tujuan dari Program KOTAKU, yang berarti bahwa belum adanya kolaborasi yang baik dengan masyarakat, fasilitas dan anggaran yang terbatas menjadi aspek yang belum mampu menuntaskan permasalahan permukiman kumuh.

b. Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Semarang Timur, bahwa pada implementasi Program KOTAKU terdapat lima program yang telah dijalankan di antaranya adalah perbaikan kondisi bangunan Gedung, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air minum, pemberian fasilitas pengelolaan sampah, dan penyediaan proteksi kebakaran. Hasilnya terdapat penurunan luas kawasan kumuh seluas 297,33 Ha. Namun dalam penelitian ini, ditemukan faktor penghambat dalam implementasi Program KOTAKU yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Semarang Timur, implementasi Program KOTAKU belum terimplementasi dengan baik terutama pada aspek partisipasi masyarakat yang kurang karena dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai tujuan adanya Program KOTAKU ini.

c. Implementasi Program KOTAKU di Kabupaten Tabalong

Pada penelitian yang dilakukan di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, bahwa pada implementasi Program KOTAKU di Kabupaten Tabalong ini dikategorikan sudah terimplementasi dengan meninjau dari indikator sumber kebijakan (elemen program), komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan (elemen kelompok sasaran terhadap penerima manfaat), dan sikap para pelaksana (elemen pelaksana program).

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Tabalong, implementasi Program KOTAKU dari beberapa aspek yang diteliti sudah terimplementasi dengan cukup, yang berarti bahwa di Kabupaten Tabalong terutama kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan dukungan terhadap Program KOTAKU sehingga dapat mempercepat pengentasan permukiman kumuh di wilayah tersebut dan selanjutnya dapat dengan mudah dalam peningkatan kualitas penghidupan masyarakat yang layak.

d. Implementasi Program KOTAKU di Kota Pontianak

Pada penelitian yang dilakukan di Kota Pontianak, bahwa pada implementasi Program KOTAKU belum disimpulkan sepenuhnya berhasil atau belum terimplementasi dengan baik. Beberapa di antaranya masih perlu ditindaklanjuti seperti keefektifan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat, sumber daya anggaran yang belum optimal oleh terbatasnya dana dan sumber daya manusia dalam pembangunan fasilitas, sikap pelaksana kebijakan yang masih acuh dalam pengadaan infrastruktur, dan struktur birokrasi yang belum terlaksana berdasar pada SOP yang mana dalam pengadaan fasilitas terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan SOP.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Pontianak ini Program KOTAKU belum terimplementasi atau belum sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program ini. Selain itu,

pemangku kebijakan memiliki kecenderungan berprinsip yang terpenting program telah dilaksanakan tanpa memperhatikan inti sasaran dan tujuan dari Program KOTAKU ini.

e. Implementasi Program KOTAKU di Kabupaten Bone

Pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone, bahwa pada implementasi Program KOTAKU sudah berjalan dengan baik pada indikator kepentingan, manfaat, perubahan, pengambilan keputusan, strategi, karakteristik lembaga, kepatuhan dan respon pelaksana. Namun pada indikator pelaksana dan sumber daya masih kurang baik. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, pelaksana yang kurang aktif, dan masyarakat yang belum peduli lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bone memiliki kesamaan dengan penelitian yang sudah dibahas sebelumnya yang mana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Program KOTAKU masih kurang menunjukkan dukungannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Program KOTAKU merupakan inisiasi Kementrian PUPR melalui Gerakan 100-0-100 yang berarti 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnyapermukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
- 2) Implementasi Program KOTAKU yang telah dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten menyatakan hasil bahwa masih belum terimplementasi dengan baik oleh adanya aspek-aspek seperti partisipasi masyarakat, pemangku kebijakan, anggaran dana yang belum sepenuhnya memberikan dukungannya terhadap sasaran dan tujuan dari Program KOTAKU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 1-14.
- Akbar, T., & Alfian, F. (2018). KAMPUNG TEMATIK SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG . *Wahana*, 37-48.
- Arung, R., & Ulimaz, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu Kota Balikpapan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 472-481.
- Drakakish. (2002). Persoalan Permukiman Kumuh. *Jurnal Geografi*.
- Firda, D., Sobirin, & Indra, T. L. (2017). Sensitivitas Permukiman Kumuh Terhadap Bencana Kebakaran di Kota Bekasi. *IRONS: Industrial Research Workshop and National Seminar*, 600-605.
- Fitri, A., Sakawati, H., & Yamin, M.N. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Jurnal Aktor*, 25-31.
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *JCE : Journal of Civic Education*, 277-286.
- Irvan, E. P. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh KOTA Pekanbaru. *JOM FISIP*.
- Putro, J. D. (2011). Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Teknik Sipil Untan*.
- Rachman, D. N., & Chairil. (2019). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran di Kawasan Padat Penduduk (Studi Kasus pada Kelurahan Kertapati Palembang). *Jurnal Ilmiah TEKNIKA*, 117-129.
- Rahmani, M. R., Arifin, J., & Rijali, S. (2020). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam Mengatasi Permukiman kumuh di Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB : Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 196-212.

- Sari, D. I. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1-14.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto. (2008). *Tinjauan Eksistensi Standar-standar Proteksi Kebakaran dan Penerapannya dalam Mendukung implementasi Peraturan Keselamatan Bangunan PPIS*. Bandung: Departemen Pekerjaan Umum.
- Sutanti, N., Tjahjono, B., & Syaufina, L. (2020). Analisis Risiko Bencana Kebakaran di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Tata Loka*, 162-174.
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2021). *Penanganan Permukiman Kumuh*. Gowa: Pusaka Almada.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Prose dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019
- Permen Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Permen Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan Peningkatan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman